

Kebijakan kriminal dalam cyberterrorism di Indonesia = The criminal policy of cyberterrorism in Indonesia / Nur Ro'is

Nur Ro'is, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348616&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menciptakan peluang baru bagi para teroris untuk menebarkan teror di cyberspace. Selain teror di cyberspace, teknologi informasi juga memberi peluang akan tehnik-tehnik baru terorisme di dunia nyata. Disisi lain, hukum melalui kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, dituntut untuk selalu responsif dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan baru yang salah satunya adalah cyberterrorism. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan kriminal, yurisdiksi dan kebijakan hukum pidana di masa datang dalam cyberterrorism di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kriminal terkait dengan cyberterrorism menggunakan pendekatan penal dan non penal. Dengan pendekatan penal meskipun secara spesifik aturan mengenai cyberterrorism belum ada, pendekatannya bisa menggunakan aturan-aturan dalam KUHP maupun di luar KUHP, dimana dalam putusan-putusan pengadilan terhadap kasus-kasus cyberterrorism menggunakan aturan-aturan terkait dengan tindak pidana terorisme. Sedangkan pendekatan non penal menggunakan pendekatan budaya berupa kampanye internet sehat. Pengaturan mengenai cyberterrorism di dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang belum diatur secara spesifik. Yurisdiksi dalam kasus cyberterrorism dilakukan berdasarkan aturan yang tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP. Diharapkan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan mencantumkan aturan kriminalisasi serangan terhadap sistem komputer atau jaringannya atau informasi yang terkandung didalamnya serta publikasi dan propaganda termasuk penyebaran rasa kebencian, penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologi terorisme. Perlu ditingkatkannya kerjasama internasional, peran pemerintah untuk mendorong penggunaan internet sehat, dan peningkatan kemampuan aparat dalam penanganan cyberterrorism.

<hr>

ABSTRACT

The rapid development of information technology has created new opportunities for terrorists to spread terror in cyberspace. Besides terror in cyberspace,

information technology will also provide opportunities new techniques of terrorism in the real world. On the other side , the law through criminal policy as a rational attempt to solve crimes, are required to always responsive in anticipation of new crimes, one of which is cyberterrorism. This research uses normative legal research methods, in order to determine the criminal policy research, the future criminal policy and law jurisdiction of cyberterrorism in Indonesia. From the results of the study found that the criminal policies related to cyberterrorism using penal and non-penal approach. With the approach of specific penal although there are no rules about cyberterrorism, the approach could use the rules in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code, where the court decisions on cases of cyberterrorism using the rules associated with criminal acts of terrorism. While the non-penal approach using a cultural approach healthy internet campaign. The regulation of cyberterrorism in the Indonesian criminal code which would come not specifically regulated. Jurisdiction in the case of cyberterrorism is based on the rules listed in the Criminal Code and the outside of the Criminal Code. Expected that the revision of the Act of 2002 Nomor.1 Prp About Anti-Terrorism, by stating the rules criminalizing attacks against computer systems or networks or the information contained and also including publications and propaganda spread hatred, incitement, glorification or worship of terrorism